

Muhammad Farhan: Isu Kelangkaan dan Kenaikan BBM Hoax Masyarakat Diminta Tidak Panic Buying

KOTA BANDUNG, Prolite – Ditengah isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga adanya kenaikan harga pada beberapa jenis bahan bakar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan angkat bicara.

Muhammad Farhan memastikan pasokan bahan bakar minyak di Kota Bandung tetap aman serta mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi energi tetap terkendali (30/3/2026).

Muhammad Farhan menjelaskan pemerintah pusat telah menjamin harga bahan bakar minyak dan bahan bakar gas bersubsidi tidak mengalami kenaikan dalam waktu dekat.

Baca Juga: [Jual Beli Kursi SPMB 2026 akan Dipidana, Wali Kota Bandung Tidak Kasih Celah](#)

“Secara umum kita masih dalam kondisi optimis. Suplai BBM dan BBG untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga terjaga. Jaminan dari Menteri Keuangan ini membuat kita semua lebih tenang, tidak perlu deg-degan,” ujar Farhan.

Muhammad Farhan: Isu Kelangkaan dan Kenaikan BBM Hoax Masyarakat Diminta Tidak Panic Buying



Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan (MetroTV)

Ia meminta seluruh daerah memastikan infrastruktur distribusi energi berjalan baik sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Farhan juga mengingatkan masyarakat tidak melakukan panic buying agar stok bahan bakar tetap tersedia merata bagi seluruh warga.

Baca Juga: Evaluasi LKPJ Jangan Sekadar Formalitas, Pansus DPRD Kota Bandung Dorong RKPD 2027 Lebih Menyentuh Kebutuhan Warga

“Kita harus meyakinkan masyarakat bahwa stok aman. Jangan sampai ada panic buying, baik BBM maupun BBG,” ujar Farhan.

Pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan solusi energi jangka panjang melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah di kawasan Bandung Raya.

Muhammad Farhan: Isu Kelangkaan dan Kenaikan BBM Hoax Masyarakat Diminta Tidak Panic Buying

Rencana tersebut meliputi pengembangan lokasi di Legok Nangka, Sarimukti, serta alternatif kawasan eks tempat pembuangan akhir Jelekong sebagai sumber energi berbasis lingkungan.

“Kami akan koordinasi dengan pemerintah pusat. Ini penting untuk solusi jangka panjang, khususnya energi berbasis lingkungan,” ujar Farhan.

Muhammad Farhan menyebut pemerintah daerah juga menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait rencana sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara.

Ia menilai kebijakan tersebut perlu diukur secara jelas agar pelayanan publik tetap berjalan optimal bagi masyarakat.



Baca Selanjutnya
Film “Autopsy: Dead Body Can Talk” Bongkar Psikologi di Balik Dunia Forensik